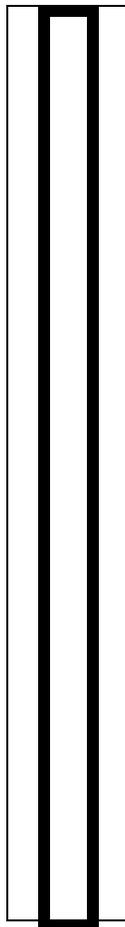




PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Manguni No. 9 Wewelen-Tondano 95615 Telp. (0431) 321271-323104. Fax. 0431-321271

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2021**



bkkbn

KATA PENGANTAR

Berkenaan dengan berakhirnya tahun anggaran 2021 berdasarkan instruksi presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Permenpan nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), pada setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu media pertanggung jawaban yang sistematis yang dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan aparatur organisasi perangkat daerah terhadap pelaksanaan peraturan dan prosedur yang berlaku, serta menggambarkan mengenai kemajuan pengevaluasian kinerja secara transparan di setiap penentuan kebijakan dalam pengambilan keputusan yang dikerjakan mengacu pada system dan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu dapat menggambarkan tentang efisiensi dan efektivitas biaya, serta kedisiplinan dan ketaatan terhadap jadwal kegiatan yang telah disusun yang merupakan langkah strategis dan tindakan operasional untuk merealisasikan capaian kinerja dan capaian sasaran.

Sejalan dengan adanya ketentuan tersebut, maka dengan berakhirnya tahun anggaran 2021, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai pertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan akuntabel yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (Satu) Tahun, tahun 2021.

Dengan adanya LKjIP Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Minahasa ini diharapkan yang berkepentingan mendapatkan gambaran tentang capaian kinerja dan hambatan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya.

Tondano, 14 Januari 2022

KEPALA DINAS



Dra. RIANY S. SUWARNO

Pembina Utama Muda

NIP. 19680414 198902 2 006

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
	DAFTAR TABEL	iii
	DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A Latar Belakang	1
	Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas	
	B Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa	2
	C Sistematika Penulisaan	15
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	16
	A Visi dan Misi	16
	B Tujuan dan Sasaran Strategis	16
	C Strategi pencapaian Tujuan dan sasaran strategis	17
	D Rencana Kerja 2021	19
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	22
	A Pengukuran Kinerja	22
	B Evaluasi Kinerja	24
	C Akuntabilitas Keuangan	29
BAB IV	PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah PNS menurut Golongan/Ruang dan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa.	13
Tabel 2	Jumlah PLKB di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa.	14
Tabel 3	Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis	17
Tabel 4	Rencana Kerja Tahun 2021	19
Tabel 3.1	Hasil Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Minahasa Tahun 2021	22
Tabel 3.2	Evaluasi Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Tahun 2021	25
Tabel 3.3	Target, Realisasi dan Prosentase Pencapaian Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2021	29
Tabel 3.4	Target, Realisasi dan Prosentase Pencapaian Belanja Langsung pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa	30

DAFTAR

Lampiran 1	Rencana kerja tahun 2021	37
Lampiran 2	Pengukuran kinerja tahun 2021	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kondisi kependudukan di Indonesia saat ini baik yang menyangkut jumlah, kualitas, maupun persebarannya merupakan tantangan yang berat yang harus diatasi bagi tercapainya keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia. Situasi dan kondisi kependudukan yang ada pada saat ini merupakan suatu fenomena yang memerlukan perhatian penanganan secara saksama, lebih sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk yang telah dijalankan selama ini dilakukan melalui program pengaturan kelahiran atau program keluarga berkualitas (KB). Selain melalui pengaturan kelahiran, upaya pengendalian pertumbuhan penduduk juga harus didukung dengan adanya penyerasian kebijakan pengendalian penduduk dengan kebijakan pembangunan bidang lainnya terutama yang berkaitan dengan kuantitas, kualitas, maupun mobilitas penduduk agar selaras, serasi, dan sinergis.

Penduduk dapat menjadi aset yang bermanfaat bagi pembangunan, salah satunya adalah kualitas penduduk, namun dipihak lain penduduk akan menjadi beban yang berat jika memiliki kualitas yang rendah. Kependudukan merupakan faktor dominan yang harus diperhatikan dalam perkembangan pembangunan.

Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) merupakan bagian dari pembangunan prioritas nasional dan pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ditandai meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tercapainya penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas. Pembangunan program Bangga Kencana ini diarahkan dalam upaya pengendalian kuantitas penduduk melalui 3 fokus prioritas, yaitu revitalisasi program keluarga berencana, penyerasian kebijakan pengendalian penduduk, dan peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu. Namun dalam pelaksanaannya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa mendapatkan amanah untuk melaksanakan revitalisasi KB dan penyerasian kebijakan pengendalian penduduk.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa

“Keluarga Berencana Adalah upaya mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas”. Berdasarkan kondisi di atas maka keberhasilan pembangunan keluarga berencana di Kabupaten Minahasa akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan Daerah.

Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang terjangkau, bermutu efektif menuju terbentuknya keluarga berkualitas. Disamping itu penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung daya tampung harus menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021 ini dimaksudkan sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa sebagai implementasi dari reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Selanjutnya laporan kinerja Instansi Pemerintah ini dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan rencana pembangunan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa secara berkelanjutan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MINAHASA

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Dinas serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Minahasa.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
6. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB;
7. Pelaksanaan Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
8. Pelaksanaan pelayanan KB;
9. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga;
10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
11. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan; dan
12. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

Kepala Dinas mempunyai tugas:

1. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Mengkoordinasikan penyusunan program Dinas, pelaksanaan program mengacu pada program Nasional dan Daerah;
3. Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
4. Melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
5. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan tata laksana pelayanan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

6. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan, kegiatan masing-masing bidang, kegiatan UPT, kegiatan kelompok jabatan fungsional dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian;
7. Mengarahkan penyelenggaraan bimbingan teknis, penyuluhan dan supervisi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
8. Melaksanakan pemantauan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program pada tahun berikutnya;
9. Mengendalikan urusan administrasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Menyampaikan laporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
12. Melaksanakan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi, pelaksanaan ketatausahaan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Pemberian pelayanan administrasi di lingkungan Badan;

3. Penyusunan rencana program dan anggaran;
4. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat;
5. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;
6. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
7. Penyelenggaraan urusan evaluasi dan pelaporan;
8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(1) Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. Menata naskah dinas, agenda, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian, serta pengarsipan dan dokumentasi;
2. Mengurus kebersihan, keamanan, ketertiban dan pemeliharaan gedung kantor;
3. Menyiapkan administrasi Perjalanan Dinas Pegawai dan keprotokolan;
4. Menyusun rencana kebutuhan rumah tangga baik barang bergerak dan tidak bergerak di lingkungan Dinas;
5. Mencatat, menyimpan, mengelola/memelihara dan mendistribusikan barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik daerah di lingkungan Dinas, serta menyiapkan bahan usulan penghapusan barang milik daerah yang ada di lingkungan Dinas;
6. Melaksanakan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
7. Membuat Daftar Nominatif Pegawai di Lingkungan Dinas;
8. Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
9. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Badan;
10. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai analisis jabatan, analisis beban kerja dan volume kerja di lingkungan Dinas; dan
11. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub bagian keuangan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan;
2. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
3. Menyusun dan melakukan usul perubahan anggaran;
4. Melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang piutang;
5. Menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan dan keuangan;
6. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam rangka penyusunan rencana anggaran;
7. Melakukan kegiatan pengelolaan keuangan mengenai intensifikasi penerimaan, efisiensi dan efektifitas pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan;
8. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan keuangan;
9. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
10. Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan pelaporan;
11. Menyampaikan laporan kepada Sekretaris; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Koordinator Perencanaan mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan bahan koordinasi rencana program dan anggaran Subbagian Perencanaan;
3. Menyiapkan bahan penyusunan rencana Subbagian Perencanaan;
4. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis.
5. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
6. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja;
7. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan;
8. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai Subbagian Perencanaan sesuai tugas dan kewenangannya;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Sub bagian Perencanaan;
10. Melaporkan pelaksanaan tugas Sub bagian Perencanaan;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan daerah di bidang pendampingan, pemberdayaan masyarakat, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi (KIE) serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
3. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
5. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Sub Koordinator Advokasi dan KIE mempunyai tugas:

1. Melakukan penyiapan bahan pembinaan di bidang advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan;
2. Menyiapkan bahan pembimbingan, penyuluhan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang advokasi dan KIE dan Penggerakan;
3. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang advokasi dan KIE;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi dibidang advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Koordinator Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP:

1. Melakukan penyiapan bahan pembinaan di bidang Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
2. Melakukan penyiapan bahan pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
3. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi dibidang Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
5. Melaksanakan pembinaan lini lapangan;

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintah dan daerah serta kebijakan teknis dibidang keluarga berencana; Dalam melaksanakan tugas Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga Berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga berencana;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang Keluarga Berencana;
4. Pelaksanaan layanan penanggulangan komplikasi/efek samping dan kegagalan ber-KB;
5. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana KB;
6. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB;
7. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
8. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana;
9. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Sub Koordinator pengendalian dan pendistribusian Alat kontrasepsi;

1. Melakukan penyiapan bahan pembinaan di bidang pengendalian dan pendistribusian Alokon;
2. Melakukan penyiapan bahan pembimbingan di bidang pengendalian dan pendistribusian Alokon;
3. Melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian Alokon;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian Alokon.

(2) Sub Koordinator Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas :

1. Melakukan penyiapan bahan pembinaan jaminan pelayanan KB;
2. Melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan jaminan pelayanan KB;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(3) Sub Koordinator pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB mempunyai tugas:

1. Melakukan penyiapan bahan pembimbingan dan peningkatan kesertaan ber-KB;

2. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
3. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pengelolaan pelayanan KB;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintah dan daerah serta kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga balita (BKB);
4. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan remaja (BKR);
5. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan (BKL/R);
6. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
7. Pemantauan dan evaluasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
8. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
9. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Sub Koordinator pemberdayaan kesejahteraan keluarga mempunyai tugas:

1. Melakukan penyiapan bahan pembinaan dibidang kesejahteraan keluarga;
2. Melakukan penyiapan bahan pembimbingan dibidang kesejahteraan keluarga;
3. Melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang kesejahteraan keluarga;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan kesejahteraan keluarga;

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Koordinator bina ketahanan keluarga mempunyai tugas:

1. Melakukan penyiapan bahan pembinaan dibidang ketahanan keluarga;
2. Melakukan bahan pembimbingan dibidang ketahanan keluarga;
3. Melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang ketahanan keluarga;
4. Pengkoordinasian penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga (PKLK), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
2. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
3. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga;
4. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
5. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
6. pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
7. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;
8. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Sub Koordinator pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk mempunyai tugas:

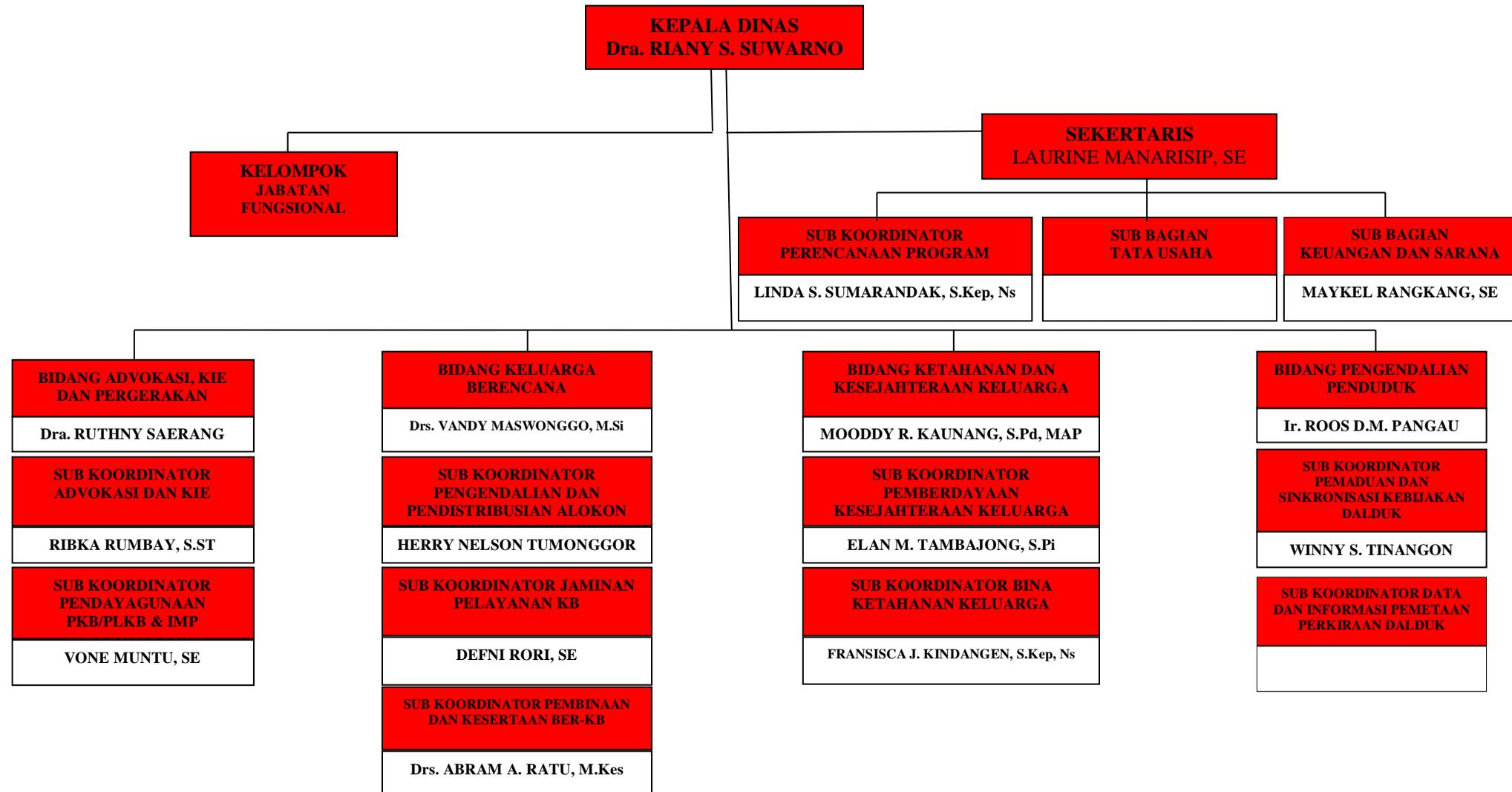
1. Melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
2. Melakukan penyiapan bahan pembimbingan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;

3. Melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk; dan
 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Koordinator data dan informasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk mempunyai tugas:
1. Melakukan penyiapan bahan pembinaan data dan informasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 2. Melakukan penyiapan bahan pembimbingan data dan informasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 3. Melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan data dan informasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; dan
 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan data dan informasi serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MINAHASA**



Kondisi kepegawaian menurut Golongan/Ruang dan Tingkat Pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah PNS menurut Golongan/Ruang dan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa.

No	Golongan/Ruang	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S-2	S-1	D-IV	D-III	D-1	SLTA	
1	IV/c		1					1
2	IV/b		1					1
3	IV/a	3	2					5
Jumlah Gol. IV								
4	III/d		2				1	3
5	III/c		4					4
6	III/b		1				1	2
7	III/a		1					1
Jumlah Gol. III								
8	II/c						1	1
9	II/b						1	1
Jumlah Gol II								
TOTAL		3	12				4	19

Tabel 2. Jumlah PLKB di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa.

No	Kecamatan	Golongan/Ruang								Total
		II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	
1.	Eris									
2.	Remboken									
3.	Lembean Timur									
4.	Kombi									
5.	Kakas									
6.	Kakas Barat									
7.	Langowan Barat								1	1
8.	Langowan Timur								1	1
9.	Langowan Selatan									
10.	Langowan Utara							1		1
11.	Kawangkoan								1	1
12.	Kawangkoan Utara								1	1
13.	Kawangkoan Barat						1			1
14.	Tompaso									
15.	Tompaso Barat					1				1
16.	Sonder									
17.	Tombariri									
18.	Tombariri Timur			1						1
19.	Pineleng									
20.	Mandolang									
21.	Tombulu									
22.	Tondano Barat						1			1
23.	Tondano Timur				1					1
24.	Tondano Utara								1	1
25.	Tondano Selatan						1			1
Jumlah				1	1	1	3	1	5	12

C. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa
- C. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran Strategis
- C. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Rencana Kerja Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Evaluasi Kinerja
- C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 ini disusun berdasarkan pencapaian program dalam strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa. Melalui visi dan misi yang akan dicapai selama lima tahun, maka dibuat rencana kerja tahunan sebagai implementasi pencapaian tujuan tersebut. Dengan demikian melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah akan menggambarkan sejauh mana rencana kerja tahun 2021 dapat dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut :

1. VISI

Minahasa Maju Dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera

2. MISI

- 1) Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing
- 2) Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan mendorong Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata.
- 3) Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
- 4) Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan
- 5) Memantapkan Manajemen Birokrasi yang Profesional melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Untuk pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Minahasa, Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Berpedoman pada Misi 1(Satu) dan Misi 5(Lima), Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana jangka menengah Kabupaten Minahasa, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Minahasa secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas

Sasaran : 1.1 Mengendalikan pertumbuhan penduduk

1.2 Meningkatkan pembinaan keluarga berencana

1.3 Meningkatkan pemberdayaan keluarga sejahtera

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran: 2.1 Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah

C. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tabel 3. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis

Indikator kinerja utama

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,3
	1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,08
	2. Meningkatkan pembinaan keluarga berencana	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	80,74%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	16%
	3. Meningkatkan Pemberdayaan keluarga sejahtera	Persentase kelompok kegiatan (Poktan) yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	50%

Indikator kinerja kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan	Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK yang di-Perdakan	1 Dokumen

		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30 org
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	3
2	Meningkatkan advokasi, komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) serta kualitas tenaga penyuluh lapangan	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	6
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	36,8%
3	Meningkatkan akses pelayanan keluarga berencana yang merata dan berkualitas	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	31%
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	76,11%
		Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	29,21%
		Persentase Kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	37,03%
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	41,59%
4	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	86%
		Median Usia kawin pertama(MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun	21 tahun

D. RENCANA KERJA TAHUN 2021

Rencana kinerja menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2021, yang mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2021 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Rencana Kerja Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja
1	Program pengendalian penduduk	Angka Kelahiran Total (Total fertility Rate/TFR)	2,08
1.1	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30 org
1.1.1	<i>Penyediaan data dan informasi keluarga</i>	<i>Jumlah Dokumen penyediaan data dan Informasi Keluarga</i>	<i>10 Dokumen</i>
2	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	80,74%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,06
2.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	6
2.1.1	<i>Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK</i>	<i>Jumlah Laporan penyediaan dan distribusi Sarana KIE Program KKBPK</i>	<i>2 Laporan</i>
2.1.2	<i>Pengelolaan Operasional dan Sarana di balai penyuluhan KKBPK</i>	<i>Jumlah laporan hasil Kegiatan Balai Penyuluhan KKBPK</i>	<i>20 Laporan</i>
2.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	36,8%
2.2.1	<i>Penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>	<i>Jumlah kader IMP Yang Melaksanakan Pembinaan Program KB bagi Masyarakat</i>	<i>1467 Kader</i>

2.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	31%
2.3.1	<i>Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	<i>Jumlah Faskes yang di visitasi dan di registrasi dan mendapatkan Distribusi alat dan obat kontrasepsi</i>	68 Faskes
2.3.2	<i>Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	<i>Jumlah Laporan hasil Kegiatan Peningkatan kesertaan penggunaan MKJP</i>	25 Laporan
2.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	3
2.4.1	<i>Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB</i>	<i>Jumlah laporan hasil pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK dikampung KB</i>	45 Laporan
3	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	51%
3.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ber-KB	86%
3.1.1	<i>Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	<i>Jumlah laporan hasil Kegiatan Promosi dan sosialisasi Poktan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga</i>	1 Laporan
4	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	3
4.1	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disahkan	80%
4.1.1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun</i>	2 Dokument
4.1.2	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah rancangan Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun</i>	1 Dokumen

4.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan keuangan yang ditetapkan/disahkan dan didistribusikan	100%
4.2.1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah SPP/SPM Gaji dan TPP yang disusun</i>	<i>28 SPP/SPM</i>
4.2.2	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD</i>	<i>1 laporan</i>
4.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi	97%
4.3.1	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>12 Bulan</i>
4.3.2	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah bulan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>12 Bulan</i>
4.3.3	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah bulan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>12 Bulan</i>
4.3.4	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah laporan /berita Acara Hasil Koordinasi dalam dan luar Daerah</i>	<i>12 Laporan</i>
4.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat operasionalisasi perkantoran tahunan	96%
4.4.1	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah materai tersedia</i>	<i>500 Lbr</i>
4.4.2	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>12 bulan</i>
4.4.3	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah THL tersedia</i>	<i>5 Orang</i>
4.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/laik fungsi	85%
4.5.1	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara (Disesuaikan Roda 4 atau Roda 2)</i>	<i>1 Unit</i>
4.5.2	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara (Disesuaikan Roda 4 atau Roda 2)</i>	<i>4 Unit</i>
4.5.3	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ diRehabilitasi</i>	<i>2 Unit</i>

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja yang digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa adalah menggunakan Indikator, Target. Capaian Program Kegiatan.

Indikator untuk Capaian Program adalah perwujudan pencapaian dari pelaksanaan program kegiatan, Sedangkan indikator atau pengukuran untuk Keluaran adalah produk yang dihasilkan sebagai keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan. Sementara untuk pengukuran Hasil yaitu penggunaan dari produk keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.1 Hasil Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Minahasa Tahun 2021

Indikator kinerja utama

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Target	capaian	Permasalahan	Ket
	Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,3	1,09	-	
1	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,08	2,07	-	
2	Meningkatkan pembinaan keluarga berencana	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	80,74%	79,61%	Situasi pandemi	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	16%	16,3%	-	

3	Meningkatkan pemberdayaan keluarga sejahtera	Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	50%	51%	-	
---	--	--	-----	-----	---	--

Indikator kinerja kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	capaian	Permasalahan	Ket
1	Meningkatkan pembangunan berwawasan kependudukan	Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK yang di-Perdakan	1 Dokumen	-	>Belum masuk dalam agenda penyusunan Perda 2 >Belum dianggarkan	
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30	23	-	
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	3	3	-	
2	Meningkatkan advokasi, komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) serta kualitas tenaga penyuluh lapangan	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	6	3	Situasi pandemi	
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	36,8%	24,72%	Situasi Pandemi	
3	Meningkatkan akses pelayanan keluarga berencana yang merata dan berkualitas	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	31%	31,60%	-	

		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	76,11%	76,47%	-	
		Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	29,21%	39,02%	-	
		Persentase Kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	37,03%	40%	Situasi pandemi	
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	41,59%	3,17%	kurangnya peserta KB PBI yang tercatat di faskes KB	
4	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ber-KB	86%	87%	-	
		Median Usia kawin pertama(MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun	21 tahun	21,7 tahun	-	

B. EVALUASI KINERJA

Pengukuran capaian kinerja hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan dalam APBD yang merupakan bagian belanja operasional dan belanja pemeliharaan serta belanja modal, sedangkan khusus untuk komponen belanja administrasi umum tidak dapat diukur secara kuantitatif capaian kinerja yang dihasilkan.

Tabel 3.2 Evaluasi Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi
1	Program pengendalian penduduk	Angka Kelahiran Total (Total fertility Rate/TFR)	2,08	2,07
1.1	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30	23
1.1.1	<i>Penyediaan data dan informasi keluarga</i>	<i>Jumlah Dokumen penyediaan data dan Informasi Keluarga</i>	<i>10 Dokumen</i>	<i>10 Dokumen</i>
2	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	80,74%	79,61%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	16%	16,3%
2.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	6	3
2.1.1	<i>Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK</i>	<i>Jumlah Laporan penyediaan dan distribusi Sarana KIE Program KKBPK</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>2 Laporan</i>
2.1.2	<i>Pengelolaan Operasional dan Sarana di balai penyuluhan KKBPK</i>	<i>Jumlah laporan hasil Kegiatan Balai Penyuluhan KKBPK</i>	<i>20 Laporan</i>	<i>20 Laporan</i>
2.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	36,8%	24,72%
2.2.1	<i>Penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>	<i>Jumlah kader IMP Yang Melaksanakan Pembinaan Program KB bagi Masyarakat</i>	<i>1467 Kader</i>	<i>1470 Kader</i>

2.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	31%	31,60%
2.3.1	<i>Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	<i>Jumlah Faskes yang di visitasi dan di registrasi dan mendapatkan Distribusi alat dan obat kontrasepsi</i>	<i>68 Faskes</i>	<i>45 Faskes</i>
2.3.2	<i>Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	<i>Jumlah Laporan hasil Kegiatan Peningkatan kesertaan penggunaan MKJP</i>	<i>25 Laporan</i>	<i>3 Laporan</i>
2.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	3	3
2.4.1	<i>Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB</i>	<i>Jumlah laporan hasil pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK dikampung KB</i>	<i>45 Laporan</i>	<i>25 Laporan</i>
3	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	50%	51%
3.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ber-KB	86%	87%
3.1.1	<i>Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	<i>Jumlah laporan hasil Kegiatan Promosi dan sosialisasi Poktan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>-</i>
4	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4

4.1	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disahkan	80%	80%
4.1.1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun</i>	<i>2 Dokument</i>	<i>2 Dokument</i>
4.1.2	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah rancangan Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>
4.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan keuangan yang ditetapkan/disahkan dan didistribusikan	100%	100%
4.2.1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah SPP/SPM Gaji dan TPP yang disusun</i>	<i>28 SPP/SPM</i>	<i>26 SPP/SPM</i>
4.2.2	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD</i>	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>
4.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi	97%	44,07%
4.3.1	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>-</i>
4.3.2	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah bulan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>
4.3.3	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah bulan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>
4.3.4	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah laporan /berita Acara Hasil Koordinasi dalam dan luar Daerah</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>-</i>
4.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat operasionalisasi perkantoran tahunan	96%	96%
4.4.1	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah materai tersedia</i>	<i>500 Lbr</i>	<i>505 Lbr</i>

4.4.2	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>
4.4.3	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah THL tersedia</i>	<i>5 Orang</i>	<i>5 Orang</i>
4.5	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase BMD dalam kondisi baik/laik fungsi</i>	<i>85%</i>	<i>24,6%</i>
4.5.1	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara (Disesuaikan Roda 4 atau Roda 2)</i>	<i>1 Unit</i>	<i>1 Unit</i>
4.5.2	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara (Disesuaikan Roda 4 atau Roda 2)</i>	<i>4 Unit</i>	<i>2 Unit</i>
4.5.3	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ diRehabilitasi</i>	<i>2 Unit</i>	<i>-</i>

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2021 sebesar :
Rp 9.093.304.500

Tabel 3.3. Target, Realisasi dan Prosentase Pencapaian Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2021

No	KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI	
			Anggaran	%
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	Rp 1,318,370,118	Rp 1,217,345,600	92
2	Tunjangan Keluarga	Rp 140,861,976	Rp 128,855,734	91
3	Tunjangan Struktural	Rp 186,375,000	Rp 174,850,000	94
4	Tunjangan Fungsional Umum	Rp 22,570,000	Rp 15,205,000	67
5	Tunjangan Beras	Rp 70,888,700	Rp 67,133,340	95
6	Tunjangan PPH Pasal 21	Rp 3,721,208	Rp 3,548,399	95
7	Pembulatan Gaji	Rp 23,073	Rp 14,814	64
8	Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	Rp 959,560,000	Rp 872,060,000	91
9	Iuran JKK	Rp 2,707,972	Rp 2,464,242	91
10	Iuran JKM	Rp 8,123,953	Rp 7,392,763	91
Jumlah		Rp 2,713,202,000	Rp 2,488,869,892	92

Tabel 3.4. Target, Realisasi dan Prosentase Pencapaian Belanja Langsung pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Minahasa

No.	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran		Realisasi	
				Sebelum perubahan	sesudah perubahan	Anggaran	%
1	Program pengendalian penduduk	Angka Kelahiran Total (Total fertility Rate/TFR)	2,08	650,000,000	-	-	-
1.1	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30 org	650,000,000	-	-	-
1.1.1	<i>Penyediaan data dan informasi keluarga</i>	<i>Jumlah Dokumen penyediaan data dan Informasi Keluarga</i>	<i>10 Dokumen</i>	650,000,000	-	-	-
2	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	80,74%	5,128,660,950	6,188,502,950	5,025,572,452	81.2082
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,06				
2.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	6	1,620,269,000	1,620,269,000	1,561,999,053	96.4037

2.1.1	<i>Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPk</i>	<i>Jumlah Laporan penyediaan dan distribusi Sarana KIE Program KKBPk</i>	<i>2 Laporan</i>	253,637,000	253,637,000	239,480,065	
2.1.2	<i>Pengelolaan Operasional dan Sarana di balai penyuluhan KKBPk</i>	<i>Jumlah laporan hasil Kegiatan Balai Penyuluhan KKBPk</i>	<i>20 Laporan</i>	1,366,632,000	1,366,632,000	1,322,518,988	96.7721
2.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPk (advokasi dan KIE)	36,8%	1,296,000,000	1,296,000,000	1,296,000,000	100
2.2.1	<i>Penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>	<i>Jumlah kader IMP Yang Melaksanakan Pembinaan Program KB bagi Masyarakat</i>	<i>1467 Kader</i>	1,296,000,000	1,296,000,000	1,296,000,000	100
2.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	31%	885,392,000	1,945,234,000	1,042,573,399	53.5963
2.3.1	<i>Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	<i>Jumlah Faskes yang di visitasi dan di registrasi dan mendapatkan Distribusi alat dan obat kontrasepsi</i>	<i>68 Faskes</i>	162,073,000	162,073,000	28,231,399	17.4189

2.3.2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Laporan hasil Kegiatan Peningkatan kesertaan penggunaan MKJP	25 Laporan	723,319,000	723,319,000	35,360,000	4.88858
2.3.3	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang pelayanan KB yang disediakan	12 unit	-	1,059,842,000	1,014,342,000	95.7069
2.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	3	1,326,999,950	1,326,999,950	1,125,000,000	84.7777
2.4.1	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah laporan hasil pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK dikampung KB	45 Laporan	1,326,999,950	1,326,999,950	1,125,000,000	84.7777
3	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	50%	19,471,700	-	-	-
3.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ber-KB	86%	19,471,700	-	-	-

3.1.1	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil Kegiatan Promosi dan sosialisasi Poktan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	19,471,700	-	-	-
4	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	3,624,147,000	2,904,801,550	2,812,938,097	96.8375
4.1	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disahkan	80%	999,400	-	-	-
4.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun	2 Dokument	499,700	-	-	-
4.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah rancangan Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	499,700	-	-	-
4.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan keuangan yang ditetapkan/disahkan dan didistribusikan	100%	3,356,916,000	2,713,202,000	2,627,730,805	96.8498
4.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah SPP/SPM Gaji dan TPP yang disusun	28 SPP/SPM	3,356,414,000	2,713,202,000	2,627,730,805	96.8498

4.2.2	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD</i>	<i>1 laporan</i>	502,000	-	-	-
4.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi	97%	41,197,100	17,669,700	16,814,200	95.1584
4.3.1	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>12 Bulan</i>	2,997,900	-	-	-
4.3.2	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah bulan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>12 Bulan</i>	14,916,200	12,670,700	11,865,200	93.6428
4.3.3	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah bulan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>12 Bulan</i>	4,999,000	4,999,000	4,949,000	98.9998
4.3.4	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah laporan /berita Acara Hasil Koordinasi dalam dan luar Daerah</i>	<i>12 Laporan</i>	18,284,000	-	-	-
4.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat operasionalisasi perkantoran tahunan	96%	152,918,500	152,918,500	150,677,320	98.5344
4.4.1	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah materai tersedia</i>	<i>500 Lbr</i>	5,050,000	5,050,000	5,050,000	100
4.4.2	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>12 bulan</i>	14,668,500	14,668,500	12,527,320	85.4029

4.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL tersedia	5 Orang	133,200,000	133,200,000	133,100,000	99.9249
4.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/laik fungsi	85%	72,116,000	21,011,350	17,715,772	84.3152
4.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara (Disesuaikan Roda 4 atau Roda 2)	1 Unit	7,966,000	6,011,350	4,605,772	76.6179
4.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara (Disesuaikan Roda 4 atau Roda 2)	4 Unit	27,000,000	15,000,000	13,110,000	87.4
4.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/diRehabilitasi	2 Unit	37,150,000	-	-	-

Dari target kinerja dan anggaran dari setiap sasaran strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa, realisasinya ada beberapa yang tidak capai dikarenakan situasi pandemic dan refocussing anggaran yang ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan Laporan kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2021, antara lain :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa mengacu pada Peraturan Bupati Minahasa Nomor 50 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa telah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya aparatur yang dimiliki yang tentunya tetap mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban diperoleh dari laporan kinerja masing-masing unit organisasi dalam lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis.
4. Dalam hal pencapaian sasaran yang ditetapkan dapat terlihat bahwa tidak seluruhnya dapat mencapai kinerja yang diharapkan. Beberapa pokok permasalahan yang menjadi kendala pencapaian kinerja sasaran strategis terutama disebabkan karena keterbatasan-keterbatasan baik pendanaan maupun sumber daya manusianya. Namun untuk tahun-tahun mendatang hal tersebut akan diupayakan untuk memperkecil kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kinerja yang ingin dicapai, tentunya dengan mengacu kepada sasaran dan program prioritas.

Dengan demikian dalam penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan dan akuntabel yang mampu mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerja dalam upaya pencapaian tujuan dari pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

KEPALA DINAS PPKB



Dr. RIANY S. SUWARNO
Pembina Utama Muda
NIP. 19680414 198902 2 006

LAMPIRAN 1

RENCANA KERJA TAHUN 2021

Sasaran	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Pagu
	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	
Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Program pengendalian penduduk	Angka Kelahiran Total (Total fertility Rate/TFR)	2,08	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30 org	Penyediaan data dan informasi keluarga	Jumlah Dokumen penyediaan data dan Informasi Keluarga	10 Dokumen	650,000,000
Meningkatkan pembinaan keluarga berencana	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	80,74 %	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	6	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Laporan penyediaan dan distribusi Sarana KIE Program KKBPK	2 Laporan	253,637,000
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,06				Pengelolaan Operasional dan Sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah laporan hasil Kegiatan Balai Penyuluhan KKBPK	20 Laporan	1,366,632,000
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	36,8%	Penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader IMP Yang Melaksanakan Pembinaan Program KB bagi Masyarakat	1467 Kader	1,296,000,000		

			<p>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</p>	31%	<p>Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</p>	<p>Jumlah Faskes yang di visitasi dan di registrasi dan mendapatkan Distribusi alat dan obat kontrasepsi</p>	68 Faskes	162,073,000
						<p>Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</p>	<p>Jumlah Laporan hasil Kegiatan Peningkatan kesertaan penggunaan MKJP</p>	25 Laporan	723,319,000
						<p>Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB</p>	<p>Jumlah sarana penunjang pelayanan KB yang disediakan</p>	12 unit	1,059,842,000
			<p>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p>	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif</p>	3	<p>Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB</p>	<p>Jumlah laporan hasil pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK dikampung KB</p>	45 Laporan	13,226,999,950

Meningkatkan pemberdayaan keluarga sejahtera	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	51%	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ber-KB	86%	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil Kegiatan Promosi dan sosialisasi Poktan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	-
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disahkan	80%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun	2 Dokument	499,700
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah rancangan Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	1 Dokument	499,700
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan keuangan yang ditetapkan/disahkan dan didistribusikan	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah SPP/SPM Gaji dan TPP yang disusun	28 SPP/SPM	2,713,202,000
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	502,000

			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi	97%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	2,997,900
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12,670,700
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	4,999,000
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan /berita Acara Hasil Koordinasi dalam dan luar Daerah	12 Laporan	-
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat operasionalisasi perkantoran tahunan	96%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai tersedia	500 Lbr	5,050,000
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	14,668,500
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL tersedia	5 Orang	133,200,000

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/laik fungsi	85%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara (Disesuaikan Roda 4 atau Roda 2)	1 Unit	6,011,350
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara (Disesuaikan Roda 4 atau Roda 2)	4 Unit	15,000,000
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/diRehabilitasi	2 Unit	-

LAMPIRAN 2

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

Sasaran	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Anggaran	
	Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Pagu	Realisasi
Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Program pengendalian penduduk	Angka Kelahiran Total (Total fertility Rate/TFR)	2,08	2,07	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30	23	Penyediaan data dan informasi keluarga	Jumlah Dokumen penyediaan data dan Informasi Keluarga	10 Dokumen	Pindah sub kegiatan	650,000,000	-
	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	80,74%	79,61%	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Stakeholder/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	6	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Laporan penyediaan dan distribusi Sarana KIE Program KKBPK	2 Laporan	2 Laporan	253,637,000	239,480,065
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	16%	16,3%					Pengelolaan Operasional dan Sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah laporan hasil Kegiatan Balai Penyuluhan KKBPK	20 Laporan	20 Laporan	1,366,632,000	1,322,518,988
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)		36,8%	24,72%	Penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader IMP Yang Melaksanakan Pembinaan Program KB bagi Masyarakat	1467 Kader	1470 Kader	1,296,000,000	1,296,000,000
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		31%	31,60%	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang di visitasi dan di registrasi dan mendapatkan Distribusi alat dan obat kontrasepsi	68 Faskes	45 faskes	162,073,000	28,231,399

									Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Laporan hasil Kegiatan Peningkatan kesertaan penggunaan MKJP	25 Laporan	3 laporan	723,319,000	35,360,000
									Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang pelayanan KB yang disediakan	12 unit	12 unit	1,059,842,000	1,014,342,000
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	3	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah laporan hasil pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK dikampung KB	45 Laporan	25 Laporan	13,226,999,950	1,125,000,000
Meningkatkan Keluarga sejahtera	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	50%	51%	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ber-KB	86%	87%	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil Kegiatan Promosi dan sosialisasi Poktan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	-	-	-

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Program penunjang urusan opemerintahan daerah	Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	4	4	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disahkan	80%	80%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun	2 Dokument	2 Dokument	499,700	-	
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah rancangan Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	1 Dokument	1 Dokument	499,700	-
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan keuangan yang ditetapkan/disahkan dan didistribusikan	100%	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah SPP/SPM Gaji dan TPP yang disusun	28 SPP/SPM	26 SPP/SPM	2,713,202,000	2,627,730,805	
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	502,000	-	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi	97%	44,07%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	-	2,997,900	-	
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12,670,700	11,865,200	

				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	4,999,000	4,949,000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan /berita Acara Hasil Koordinasi dalam dan luar Daerah	12 Laporan	-	-	-
		96%	96%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat operasionalisasi perkantoran tahunan				
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai tersedia	500 Lbr	505	5,050,000	5,050,000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	14,668,500	12,527,320
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL tersedia	5 Orang	5 Orang	133,200,000	133,100,000
		85%	24,6%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik/laik fungsi				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara (Disesuaikan Roda 4 atau Roda 2)	1 Unit	1 Unit	6,011,350	4,605,772
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara (Disesuaikan Roda 4 atau Roda 2)	4 Unit	2 Unit	15,000,000	13,110,000

									atau Lapangan					
									Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ diRehabilitasi	2 Unit	-	-	-